

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2021**

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KENDARI**

*Jl. Kompleks Bumi Praja Anduonohu 93232 Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara Telp. (0401)-3195855 Fax. (0401)-
3195513*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb. Salam Sejahtera,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga tugas yang diemban Balai POM di Kendari dalam rangka mewujudkan visi Badan POM RI yaitu Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa dapat diselesaikan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Balai POM di Kendari Tahun 2021.

Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi dan Surat Keputusan Kepala BPOM nomor HK.02.02.1.02.20.66 tahun 2020 tanggal 18 Februari tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat yang harus dilaksanakan bagi setiap instansi pemerintah, oleh karena itu segala bentuk kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel baik dari segi kinerja maupun keuangan. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai wujud pelaporan implementasi SAKIP, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pencapaian Kinerja Instansi berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu Laporan Kinerja yang memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

Komitmen Balai POM di Kendari untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten untuk mewujudkan “*Good Governance*”. Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Balai POM di Kendari yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini merupakan upaya dan usaha pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Kendari yang tertuang dalam 11 sasaran kegiatan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Balai POM di Kendari dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Obat dan makanan memiliki perang yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Oleh karenanya ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Interim 2020/2021 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Kendari tahun 2021 merupakan laporan capaian kinerja (performance result) selama triwulan 1 tahun 2021 dikaitkan dengan rencana kinerja tahunan dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sepenuhnya mengacu pada Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari Tahun 2021.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2021 Balai POM di Kendari melaksanakan 11 sasaran kegiatan dan untuk mengukur pencapaian kinerja ditetapkan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk sasaran kegiatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 11 sasaran strategis terdapat 4 sasaran strategis dengan kriteria “Sangat Baik”, 6 sasaran strategis dengan kriteria “Baik”, dan 1 sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai POM di Kendari didukung anggaran APBN Tahun Anggaran sesuai DIPA nomor : DIPA-2021-063.01.2.432932/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar 22.849.992. 000,- (Dua Puluh Dua Miliar Delapan Empat Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah),

Pada triwulan 1 tahun 2021 ini, beberapa indikator belum tercapai sesuai target yang telah ditentukan permasalahan dan kendala yang dihadapi Balai POM di Kendari dalam pencapaian target kinerja antara lain Pelaksanaan Kegiatan secara tatap muka masih tetap di batasi hal ini menyebabkan capaian realisasi kegiatan dan anggaran juga capaian indikator kinerja belum optimal .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KEDUDUKAN.....	5
1.4 TUGAS	5
1.5 FUNGSI	5
1.6 STRUKTUR ORGANISASI.....	6
1.7 ISU STRATEGIS	10
1.8 PERMASALAHAN UTAMA.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 RENCANA STRATEGIS	23
2.2 PERJANJIAN KINERJA	26
2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	29
2.4 METODE PENGUKURAN	31

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	34
	3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
	3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	41
	3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR	44
	3.4 MATRIKS ANALISA SUMBER DAYA	127
	3.5 REALISASI ANGGARAN.....	128
 BAB IV	 PENUTUP	 144
	4.1 KESIMPULAN.....	144
	4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA.....	144
	4.3 SARAN.....	145
 LAMPIRAN		 146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Balai POM di Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Balai POM di Kendari Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISAS

Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M. KT. 01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan /atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas:

- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM
- Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM
- Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

1. Profil Balai POM Kendari

Balai POM di Kendari yang beralamat di Jl. Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari 93232, merupakan salah satu UPT BPOM Tipe A yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai POM di Kendari berkoordinasi dengan Loka POM dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Profil Loka POM Bau-Bau

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, didirikan 1 Loka POM di Provinsi Sulawesi Tenggara beralamat di Jl. Bakti ABRI Kelurahan Bukti Wolio Indah Baubau dengan wilayah kerja Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Buton Utara.

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3 KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai.

1.4 TUGAS

Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Balai POM di Kendari sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Kendari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan adanya Surat Edaran Plt. Sestama No.HK.02.02.2.22.12.19.4727 Tahun 2019 tentang Pemetaan Peralihan Jabatan Administrator dan Pengawas Kedalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM, pada tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan pelantikan Pejabat Fungsional yang berpindah fungsi menjabat fungsional tertentu sesuai dengan fungsinya



1. Fungsi Pengujian

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Adapun fungsinya adalah ;

Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan

- a. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

2. Fungsi Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan yang terdiri dari Seksi Inspeksi dan Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Fungsi Bidang pemeriksaan adalah ;

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana /fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan distribusi Obat dan makanan dan sarana /fasilitas pelayanan kefarmasian.
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan distribusi produk obat dan makanan.
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) Obat dan makanan

- e. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan sampling produk obat dan makanan.

3. Fungsi Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan makanan.
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Fungsi Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Fungsi Bidang Penindakan adalah ;

- a. Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

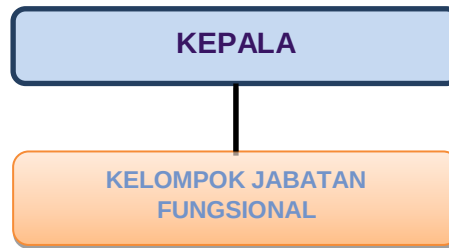
Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan

Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai ;

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

6. Loka POM di Kota Baubau

Loka POM di Kota Baubau ini sebelumnya merupakan POS POM Baubau yang telah beroperasi sejak Agustus 2008. Sejak Oktober 2018 status tersebut kemudian resmi berubah menjadi Loka POM. Loka POM di Kota Baubau dipimpin oleh seorang Kepala dibawah koordinasi Kepala Balai POM di Kendari, dengan struktur organisasi, sebagai berikut :



1.7 ISU STRATEGIS

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun beberapa aspek strategis organisasi antara lain:

1. Aspek Internal.

- a. Sumber Daya Manusia.

Jumlah sumber daya manusia Balai POM di Kendari per 31 Desember 2020 sebanyak 97 orang, terdiri atas 74 PNS dan 23 Non PNS. Berikut presentase jumlah pegawai BPOM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan.

Dari jumlah SDM diatas BPOM di Kendari masih dibutuhkan pegawai berdasarkan hasil ABK . Dalam menunjang pengawasan obat dan makanan . ASN Balai POM di kendari dalam era globalisasi industry 4.0 di perlukan kompetensi SDM dalam teknologi informasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan serta pelayanan public secara online

NO	Bidang/Bagian	S2	Apoteker/Profesi	S1	Non Sarjana	Total
1	Kepala Balai	1	0	0	0	1
2	Bagian Tata Usaha	0	2	8	8	18
3	Bidang Pemeriksaan	1	5	4	1	11
4	Bidang Penindakan	1	1	5	0	7
5	Bidang INFOKOM	1	3	3	0	7
6	Bidang Pengujian	1	13	9	7	30
7	Non PNS	0	3	6	14	23
TOTAL		4	27	35	30	97

NO	Bidang/Bagian	Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Balai	1	0
2	Bagian Tata Usaha	9	10
3	Bidang Pemeriksaan	4	7
4	Bidang Penindakan	3	4
5	Bidang INFOKOM	0	6
6	Bidang Pengujian	4	26
7	Non PNS	18	5
TOTAL		39	58

a. Sarana Gedung

Table 1 - Sarana & Luas Tanah Balai POM di Kendari

Bangunan	Luas Tanah
Kantor Lama	1.315 m2
Kantor Baru	17.200 m2
Loka POM	3.712 m2

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Balai POM di Kendari pada tahun 2020 mencapai 87,27% terhadap standar sarana dan prasarana Badan

POM berdasarkan perka Badan POM Nomor 20 tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM.

b. Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari berkomitmen dan sedang berproses untuk mendapat Wilayah Bebas Korupsi Balai POM di Kendari Tahun 2021

c. Keunggulan Balai POM di Kendari

- Sulawesi Tenggara sebagai penghasil Kacang Mente dimana Petugas Balai POM di Kendari melakukan pendampingan dan pembinaan pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB sebagai syarat registrasi MD.
- Pada tahun 2020 Balai POM di Kendari menginisiasi pelaksanaan pengujian Covid 19 bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Tenggara dan bertindak sebagai operator.

d. Prestasi Balai POM di Kendari

- Penghargaan dari Kanwil DJP Provinsi Sulawesi Tenggara, Peringkat I Treasury Award Tahun Anggaran 2018, apresiasi satuan kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Anggaran Besar tahun 2019.
- Penghargaan dari Kementrian PAN RB sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “**Baik**” tahun 2019.

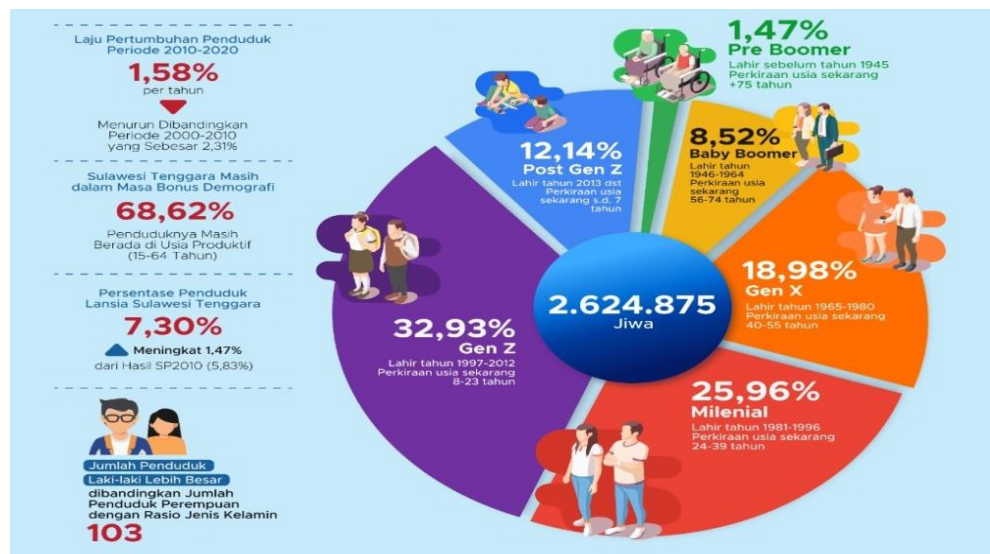
- Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian LP-245-IDN yang menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 tahun 2020.
- Memperoleh sertifikat QMS ISO 9001:2015 tahun 2020 dengan nomor sertifikat :SNI ISO CERT No 824 100 19089.
- Memperoleh Piagam Penghargaan Badan POM tahun 2020 sebagai Juara III dalam rangka Lomba Cipta Lagu Mars Badan POM HUT XIX.

2. Aspek Eksternal

a. Kondisi Geografis dan Demografi

Sulawesi Tenggara (Sulta) merupakan sebuah [provinsi](#) di [Indonesia](#) yang terletak di bagian tenggara [pulau Sulawesi](#) dengan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi. Sulawesi Tenggara memiliki jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 2 kota, 15 Kabupaten dengan total 191 kecamatan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, kondisi demografi Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini ;

Gambar 1 - Hasil Sensus Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara 2020



Dari gambar di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2.624. 875 jiwa yang terdiri dari 50,69% laki-laki dan 49,31% perempuan. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa saat ini 68,62% penduduk Sulawesi Tenggara masih berada dalam usia produktif antara 15-64 tahun.

b. Pola Transportasi

- Transportasi Udara, dengan adanya fasilitas bandara dan rute jalur pesawat dari Kota Kendari ke Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau, dengan waktu tempuh 30 – 45 menit. Transportasi laut yaitu menggunakan kapal cepat (jet foil), Kapal Kayu, Kapal Feri, dan Kapal Penumpang ke kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten
- Konawe Kepulauan, dengan waktu tempuh tercepat 4 jam dan terlama 12 jam.
- Transportasi darat yaitu ke Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Bombana dan Kota Kendari menggunakan kendaraan dinas ataupun kendaraan umum, dengan waktu tempuh tercepat 1 jam dan terlama 10 jam.

c. Sarana yang Diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai POM di Kendari sejumlah 3.497, namun yang diawasi masih terbatas sebanyak 511 sarana distribusi dan 54 sarana produksi, hal ini disebabkan kerana keterbatasan SDM tapi akan tetap dijadikan target Pengawasan selanjutnya.

1.8 PERMASALAHAN

1. Covid – 19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan *corona virus disease* 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Data tanggal 17 Februari 2021, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 108.822.960 jiwa, dengan 2.403.641 kasus kematian. Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri,

jumlah kasus positif sudah mencapai 9.843 jiwa dengan korban meninggal dunia sebanyak 190 jiwa, dan yang pulih sebanyak 8792.

Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau *rapid test* dan swab massal untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan- kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19, serta penyediaan Vaksin yang didistribusikan sejak Januari 2021. Selain itu dalam rangka mendukung program pemerintah di masa pandemi Covid-19, Balai POM di Kendari melaksanakan tugas dengan sistem *Work From Home* (WFH) dan WFO dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari). Balai POM di Kendari juga memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pinjam pakai peralatan PCR yang merupakan alat utama dalam pengujian sampel specimen *COVID-19*. Sehingga pemerintah Daerah tidak lagi mengirimkan spesimen ke Labkesda Makassar

2. Penguatan Regulasi

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Kendari masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik.

3. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan

3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Mutu obat JKN merupakan hal yang perlu dipastikan dalam penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Peran BPOM dalam penjaminan mutu obat JKN telah dan akan terus dilakukan dengan ikut serta dalam kriteria lelang e-katalog berupa penambahan parameter mutu untuk penentuan pemenang e-katalog mencakup histori pemenuhan CPOB fasilitas produksi, serta faktor mutu dan keamanan produk.

Balai POM di Kendari merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Kendari, yaitu:

4. Globalisasi, Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan

berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam system pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsive

5. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

4. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kendari baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan

6. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

5. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kendari baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan

7. diperlukan Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

6. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kendari baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

7. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Kendari melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design RB 2010 s.d 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Kendari merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan RB.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Balai POM di Kendari terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Kendari yang ditetapkan dalam SK No HK 02.02.115.05.20.1079, Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Arah kebijakan.



BADAN POM RI
VISI & MISI

Obat dan Makanan Aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong

MISI

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:

Gambar 2 - Penjelasan Visi & Misi BPOM RI



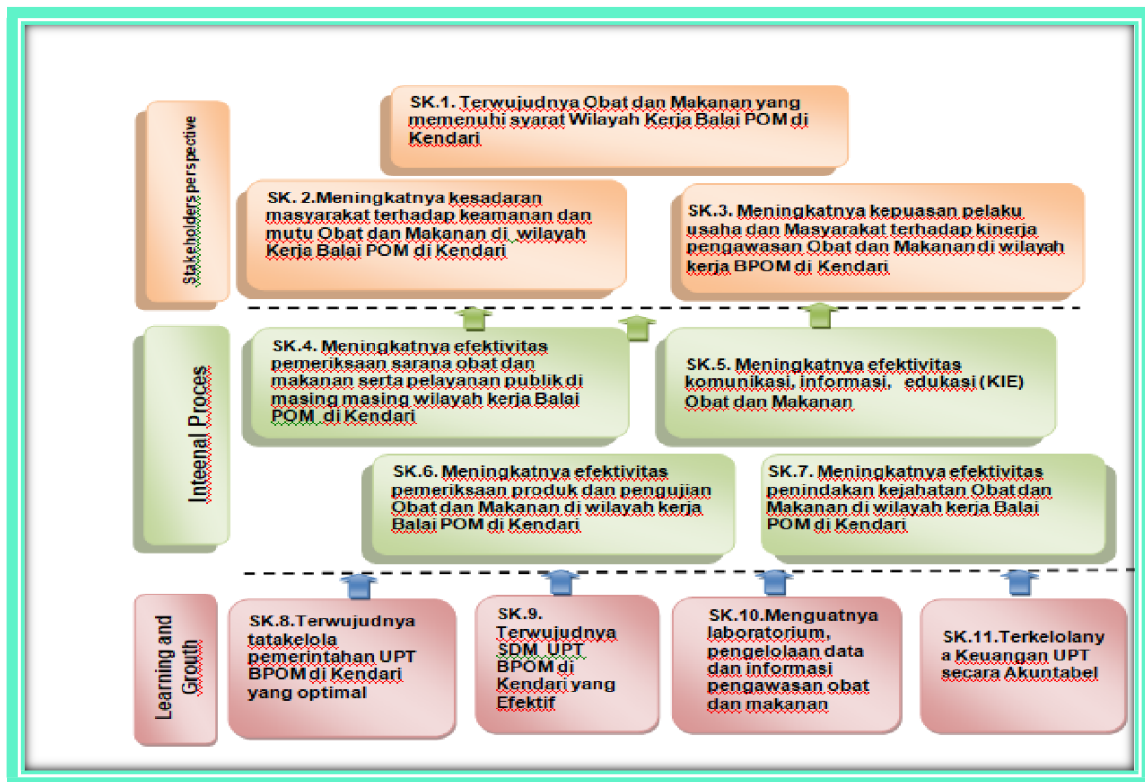
2. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan
- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- d. Memperkuat fungsi Pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku Usaha Obat dan Makanan.
- f. Terwujudnya perlindungan Masyarakat dan kejahatan Obat dan Makanan.
- g. Terwujudnya lembaga Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan prinsip dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kendari berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari, maka Balai POM di Kendari menetapkan 11 sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama yang di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari 2020 .

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPOM di Kendari dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di Kendari untuk tahun 2020 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI). Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Kendari digambarkan dalam tabel 6.

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari	1	Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	80,80 %
		2	Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	78 %
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	80 %
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	76 %
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	5	Indeks kesadaran Masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Kendari	68
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masrakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	83
		7	Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69
		8	Indeks kepuasaan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di	9	Persentase keputusan Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50

	lingkup Balai POM di Kendari	10	Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti dari pemangku kepentingan	54,8
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
		14	Indeks Pelayanan Publik	3,51
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi informasi , edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,49
		16	Jumlah sekolah dengan pangan Jajanan Anak sekolah (PJAS)	14
		17	Jumlah Desa Pangan Aman	4
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produksi Obat dan Makanan yang bersedar di Lingkup Balai POM di Kendari	19	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Kendari	22	Indeks RB Balai POM di Kendari	85
		23	Nilai AKIP Balai POM di Kendari	80
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalisme ASN Balai POM di Kendari	75
10	Menguatnya Labaoratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72
		26	Indeks pengelolaan data Informasi Balai POM di Kendari	1,51
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel	27	Nilai Kinerja Balai POM di Kendari	93,4
		28	Tingkat efisien penggunaan anggaran Balai POM di Kendari	95

Perjanjian Kinerja tahun 2021 Balai POM di Kendari pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Target pada RKT tahun 2021 mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan diawal tahun, tetapi setelah adanya penetapan Renstra

BPOM di Kendari tahun 2020-2024 pada bulan Mei 2020 maka target Perjanjian Kinerja tahun 2021 baik target indikator sasaran kegiatan telah disesuaikan sesuai target renstra dan target output juga disesuaikan dengan yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Kendari sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM Kendari selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Table 2 - Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 BPOM di Kendari

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	339.858.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	179.600.000
		Persentase Obat	83	83	83	83	470.042.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	BPOM di Kendari	yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	256.744.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	71	124.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	84.5	84.109.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	72	96.160.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0	0	0	90,5	143.090.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Kendari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	5	15	35	53	142.140.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	5	15	40	62.3	287.550.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	10	25	45	86	53.962.000
		Persentase sarana produksi Obat dan	10	20	40	50	82.440.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Makanan yang memenuhi ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	10	20	45	60	981.410.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kendari	0	0	0	3.76	20.633.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	0	91.28	565170000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	20 %	50%	40	711.488.000
		Jumlah desa pangan aman	0	20%	50%	12	888.554.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	20%	50%	6	256.074.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai	10	40	65	93	964.187.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari UPT	standar					
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	40	60	87	170.050.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	15	45	88	83.721.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Kendari yang optimal	Indeks RB BPOM di Kendari	0	0	0	89	136.737.000
		Nilai AKIP BPOM di Kendari	0	0	0	84	716.380.000
9	Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kendari	0	0	0	77	11.288.303.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	optimal						
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	73	3.360.890.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal	0	0	0	2	70.000.000
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Kendari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari	0	0	0	94	120.940.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Kendari	0	0	0	Efisien (95.5)	255.760.000

2.4 METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaann

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi BPOM di Kendari. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai berikut :

1. BPOM di Kendari melakukan pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e – performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun di integrasikan dengan aplikasi e- SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodic triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya;
 2. BPOM di Kendari menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM;
 3. Mengunggah / mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi *e-performace*, *monev SMART DJA*, *monev Tepra*, *monev Bappenas*, *sertabit.ly* / capaian UPT tahun 2021;
- Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan BPOM di Kendari dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja BPOM di Kendari dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan kinerja balai lain sesuai Cluster yang ditentukan
4. Melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dan selama tahun 2021, BPOM di Kendari telah melaksanakan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 11 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja yang dilakukan pengukuran setiap tahunnya. Perhitungan Capaian sasaran kegiatan Tahun 2020 tersebut adalah hasil perbandingan realisasi dengan target tahunan yang ditetapkan.

➤ Adapun kriteria penilaiannya sebagai berikut ;

Persentase Capaian Indikator dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

➤ Indikator Kinerja

Table 3- Kriteria Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	< 50%	Sangat Kurang
	$50 \leq X < 70\%$	Kurang
	$70 \leq X < 90\%$	Cukup
	$90 \leq X < 110\%$	Baik
	$110 \leq X < 120\%$	Sangat Baik
	>120%	Tidak dapat disimpulkan

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai POM di Kendari tahun 2020 – 2024, penetapan Kinerja tahun 2021 memuat 11 sasaran kegiatan. Berdasarkan data yang diperoleh selama tahun 2021 kemudian diperoleh kriteria capaian sasaran kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Table 4 - Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2021

N0	SASARAN STRATEGI	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai POM Kendari	126,43	Tidak dapat disimpulkan
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai POM di Kendari	106,76	Baik

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	0	0
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public dilingkungan BPOM di Kendari	121	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Lingkup BPOM di Kendari	101,14	Baik
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	112,48	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	2,14	Sangat Kurang
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM Kendari yang optimal	0	0
9	Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang bekerja optimal	0	0
10	Menguatnya Laboratorium pengelola data informasi pengawasan Obat dan Makanan	0	0
11	Terkelolanya keuangan BPOM di Kendari secara akuntabel	0	0

Pada tabel di atas dapat diketahui sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik 4, kriteria Baik berjumlah 6, dan terdapat 1 sasaran kegiatan yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat yang memiliki kriteria “Tidak dapat Disimpulkan”.

Dari 11 sasaran kegiatan yang dijelaskan pada tabel di atas kemudian diukur dengan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Table 5 - Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Kendari	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80 %	98.00	117.22%	Sangat baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78 %	100	125.00%	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80 %	100	120.46%	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76 %	25	31.25%	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	0	0%	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83			
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	Kendari	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Kendari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50			
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54,8			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	16.28%	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	50	100%	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	78.82	131.37%	
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kendari	3,51	3.57	0 %	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,49			
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	Progres 5%		
		Jumlah desa pangan aman	14	Progres 5%		
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	Progres 5%		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2			
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92			
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	2,14	2.43	Sangat kurang
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Kendari yang optimal	Indeks RB BPOM di Kendari	86	0	0	0
		Nilai AKIP BPOM di Kendari	85	0	0	0
9	Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kendari	80	0	0	0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75	0	0	0
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal	72	0		
11	Terkelolanya Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari		0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	BPOM di Kendari secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Kendari	93,4	0		

Penjelasan mengenai setiap indikator kinerja, perbandingan setiap indikator kinerja dengan Balai POM pembanding, perbandingan kinerja tahun sebelumnya, serta perbandingan kinerja dengan Rencana Strategis BPOM 5 tahun kedepan akan di bahas lebih detail pada penjelasan setiap indikator di bawah ini.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR



Sasaran Kegiatan 1 yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan stakeholder perspektif, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat yang memenuhi syarat, Persentase makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.



Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan

kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase Obat MS} : \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 98.00 % dengan persentase capaian sebesar 117.22 %. Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel acak obat yang dilakukan oleh BPOM di Kendari bersama Loka POM di Baubau sebanyak 175 sampel.

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Table 6 - Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	98	117.22%	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sudah masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai capaian 117.22 %. Target nasional untuk IKU tersebut yaitu 83.6 dengan demikian target nasional dapat terlampaui .

Adapun faktor pendukung sehingga hal ini dapat tercapai ialah Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memproduksi Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan CDOB, CDOTB dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan label.

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Renstra 2020-2024

Table 7 - Perbandingan Realisasi Triwulan 1 2021 dengan Renstra

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target sd 2024	Capaian thdp target 2024	Gap
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98	92.3	117.22%	0

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, realisasi indikator persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 mencapai 98 % atau capaian 117 .22 % dibandingkan target (Sangat Baik).

3. Faktor Penghambat/Pendukung Kegagalan/Keberhasilan

Hambatan untuk mencapai IKU tersebut adalah adanya Pandemi COVID-19 sehingga pada bulan Maret dan April tidak ada pengujian sampel sehingga ada pengurangan jumlah sampel dan adanya penetapan jadwal kerja WFH dan WFO, namun untuk mencapai target dilakukan rapat internal setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan mengacu pada prioritas sampling tahun 2021.

4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja :

- Kegiatan kaji ulang manajemen dan tekni laboratorium serta evaluasi pengujian
- Rapat internal setiap bulan baik secara luring maupun daring

5. Analisis Sumber Daya

Mengacu pada tabel efisiensi Anggaran dan matriks SDA sesuai tabel.

 Persentase Makanan yang Indikator 2: Memenuhi Syarat

Persentase yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil perhitungan :

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa yang tidak memenuhi syarat meliputi makanan yang tidak memiliki nomor ijin edar, makanan kadaluarsa/rusak, makanan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut. Pada triwulan 1 tahun 2021, jumlah sampel acak yang disampling sebanyak 124 sampel. Sampel kategori MS sebanyak 1 dan TMS sebanyak 0 .

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Table 8 - Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	100	125.00%	Tidak dapat disimpulkan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat melampaui target dengan realisasi 100 % dengan nilai capaian 125.00 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra 2020-2024

Table 9 - Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Target sd 2024	Capaian thdp target 2024	Gap
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	100	86	125.00%	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa realisasi triwulan 1 tahun 2021 sudah diatas dari target dalam Rencana Strategis 2020-2024 sebesar 100 persen dengan capaian 125 persen dibandingkan target (Sangat Baik).

3. Faktor Penghambat/Pendukung Kegagalan/Keberhasilan

- Petugas sampling dilapangan telah menyesuaikan target yang sudah ada dalam prioritrs sampling, dan pengawasan sarana produksi yang sesuai dengan CPPB (Cara Produksi Pangan yang baik)
- Petugas pengujian telah melakukan pengujian sesuai parameter uji yang dipersyaratkan serta time line pengujian sesuai SOP Mikro yang berlaku di Balai POM di Kendari.
- Pengawasan sarana produksi yang sesuai dengan CPPB (Cara Produksi Pangan yang baik)
- Petugas pengujian telah melakukan pengujian sesuai parameter uji yang dipersyaratkan serta time line pengujian sesuai SOP Mikro yang berlaku di Balai POM di Kendari.
- Edukasi kepada pelaku usaha tentang cara Produksi Pangan yang baik dan edukasi kepada masyarakat tentang Keamanan Pangan.
- Kegagalan yang muncul adalah adanya pandemic Covid-19 sehingga ada beberapa sampel yang melewati time line pengujian sebanyak 35 sampel, Adapun tindak lanjut perbaikan adalah lembur bagi pengujian dalam rangka penyelesaian sampel.

   Persentase Obat yang aman dan Indikator 3:bermutu berdasarkan hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Obat mencakup Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak. Indikator tersebut diperoleh dengan rumus:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Table 10 - Daftar Sampel Obat Targeted yang di

No	Bulan	Sampel Targeted yang diperiksa	Sampel Targeted yang diuji	
			MS	TMS
1	Januari	0	0	0
2	Pebruari	10	10	0
3	Maret	18	18	0
Total		28	28	0

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 11 - Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
-------------------	--------	-----------	---------	----------

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	100	120.46%	Sangat baik
---	----	-----	---------	-------------

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan memiliki nilai capaian sebesar 120,49% . target nasional untuk IKU tersebut yaitu 85 dengan demikian target nasional juga dapat terlampaui.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra 2020-2024

Table 12 - Perbandingan Kinerja dengan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Target sd 2024	Capaian thdp target 2024	Gap
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100	96	104	

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk tahun 2021 sudah melampaui target dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024 dengan nilai 100 dengan demikian realisasi kinerja Balai POM di kendari untuk indikator Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan 1 tahun 2021 sudah baik.

3. Faktor Penghambat/ Pendukung Kegagalan/ Keberhasilan

Adapun faktor pendukungnya yaitu :

- Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik sehingga memperkecil peluang beredarnya obat yang berbahaya bagi masyarakat.
- Edukasi kepada pelaku usaha yang berjalan dengan baik.

Faktor penghambat adalah beberapa sarana distribusi obat yang tidak memenuhi ketentuan (TMK)

 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan
Indikator 4:

Yang dimaksud makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu atau tanpa bahan tambahan:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati , produk pertanian,kehutanan,perikanan,peternakan , perarian dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,dan atau pembuatan makanan atau minuman (UU no 38 tahun 2012).

Aman dan bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarakan criteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan menggunakan sampling targeted/ purposive di tahun berjalan.

Kriteria makanan tidak Memenuhi syarat adalah Pangan atau kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.Untuk pangan olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan.

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Makanan MS : } \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Table 13 - Daftar pengujian sampel makanan targeted

No	Bulan	Sampel Targeted yang diperiksa	Sampel Targeted yang diuji	
			MS	TMS

1	Januari	0	0	0
2	Pebruari	37	3	4
3	Maret	6	16	0
Total		43	19	4

Table 14 - Daftar Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat Uji

No	Komoditi	Unit	Nama Sampel	TMS
Makanan		Balai		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

21				
22				
23				
24				
25				
26				

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	25	31.25%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan masuk dalam kategori sangat kurang dengan nilai capaian sebesar 31.25 persen. Target nasional untuk IKU tersebut yaitu 72 dengan demikian target nasional tidak terpenuhi.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 15 - Perbandingan Realisasi kinerja dengan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target sd 2024	Capaian thdp target 2024	Gap
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	25	86	29	57

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan belum target renstra dengan GAP yang masih sangat tinggi.

3. Faktor Penghambat / Pendukung Tercapainya Keberhasilan / Kegagalan

- ✓ Adapun faktor pendukungnya yaitu :
 - a. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik sehingga memperkecil peluang beredarnya obat yang berbahaya bagi masyarakat.
 - b. Edukasi kepada pelaku usaha yang berjalan dengan baik.
- ✓ Adapun faktor penghambatnya yaitu :

Adanya 27 sampel yang TMS Siklamat, benzoate, Sulfat dan lain-lain serta adanya sampel yang melewati time line . Adapun tindak lanjutnya adalah monitoring dan evaluasi terhadap sarana fortifikasi.

4. Analisis Program

- a. Kegiatan KIE yang melibatkan sekolah dalam rangka pengawasan anak sekolah.
- b. Kegiatan kaji ulang manajemen dan teknis laboratorium.
- c. Rapat Internal tentang pembahasan Prioritas Sampling.



Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap
Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di
Wilayah Kerja Balai POM di Kendari
SASARAN KEGIATAN 2

Sasaran kegiatan 2 ini mencakup 1 indikator kinerja yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness indeks*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu.

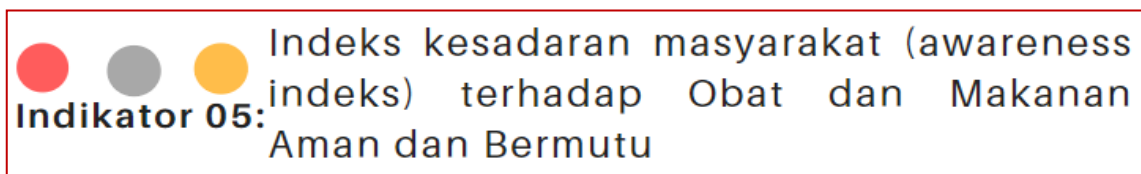
Indeks kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu :

1. Pengetahuan, bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan, seberapa baik

pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan dengan benar, dan di sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

2. Sikap, untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Perilaku, untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.



1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 16 - Perbandingan Realisasi dengan Kinerja IKU.5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
5. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71	0	0%	

Dari tabel di atas diketahui nilai realisasi kinerja untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness indeks*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan

Bermutu tahun 2021 belum ada nilai capaian karna belum ada hasil pengukuran dari Badan POM

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.

Indeks Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kendari untuk menggambarkan sejauh mana kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan dengan benar, selain itu juga untuk melihat sejauh mana informasi dan/atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Dalam indeks kesadaran masyarakat ini juga untuk melihat sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu.

Pengukuran Indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat kinerja BPOM dalam memberikan jaminan terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang beredar di masyarakat. Hasil survei ini akan bermanfaat sebagai rekomendasi bagi Balai POM di Kendari dalam rangka peningkatan kinerja dalam melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pengawasan produk Obat dan Makanan.

Survei Indeks kesadaran masyarakat menggunakan Quantitative Research, potong lintang (Cross-sectional) dengan perhitungan kerangka sampel menggunakan margin error (MoE 10%) dengan estimasi level provinsi. Pemilihan sampel/responden adalah secara acak (*random*). Penetapan populasi/responden berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan 514

kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner yang telah di-*install* di *smartphone* enumerator. Analisis data dilakukan secara universal dan bivarial untuk mendapatkan nilai indeks kesadaran masyarakat dengan target masyarakat dari kalangan anggota Rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan.

Table 17 - Kategori Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)

Kategori	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	<45	45	0,3
Kurang Baik	45 – 60	15	12,82
Cukup Baik	60 – 75	15	64,4
Baik	75 – 90	15	21,69
Sangat Baik	≥ 90	10	0,79

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

Table 18 - Perbandingan Realisasi IKU.5 dengan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target sd 2024	Capaian thdp target 2024	Gap
5. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness indeks</i>) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	0	86	0	0

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness indeks*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu pada tahun 2021 masih belum ada hasil pengukuran dari Badab POM

3. Faktor Penghambat / Pendukung terjadinya Kegagalan / Keberhasilan

Dari hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah mempunyai sikap yang cukup baik terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, Kosmetik dan pangan olahan yang tidak terdaftar. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuaipetunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indeks kesadaran yang nilainya paling rendah yaitu 69,5. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BPOM Kendari dalam melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk

beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Sulawesi Tenggara yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial.

Karena itu BPOM di Kendari tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Sulawesi Tenggara sebagai juru tutur atau penyambung lidah BPOM Kendari dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Kegiatan KIE dengan melibatkan tokoh masyarakat menjadi perhatian masyarakat untuk datang dan menyimak materi obat dan makanan yang aman dan bermutu yang disampaikan oleh Tim BPOM di Kendari. BPOM di Kendari memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemi covid 19. Pada tahun 2020 BPOM di Kendari telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Ipemi, Asprindo, Ismafarsi, Media dll. Semua komunitas tersebut merupakan *agent of Change* dan mitra BPOM di Kendari mempunyai ikatan yang erat. Infografis yang disebarluaskan oleh BPOM di Kendari menjadi salah satu pilihan yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan alternatif untuk hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BPOM Kendari. Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik di sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Produsen dan Konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Peningkatan pemberdayaan masyarakat akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

4. Alternatif Solusi

Dari hasil survey kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman, dapat disimpulkan sebagai berikut :

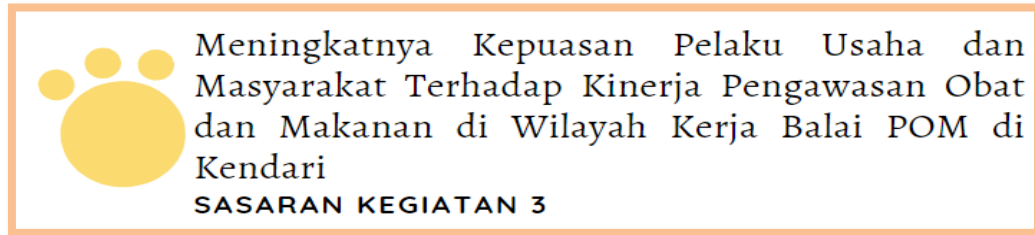
- a. Sebagian masyarakat telah menunjukkan sikap yang baik terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu yang ditunjukkan dengan selalu membaca petunjuk penggunaan, melihat kondisi kemasan, mengetahui efek samping produk, petunjuk penyimpanan yang ada di label produk obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
- b. Sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa ada produk Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar.
- c. Sebagian besar masyarakat mengetahui tanggal kadaluwarsa yang harus dilihat pada kemasan Obat dan Makanan
- d. Masyarakat mengetahui bahwa ada produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar.

Media sosial yang merupakan sarana edukasi yang relatif murah namun efektif tetapi akan menjadi prioritas bagi BPOM di Kendari untuk memberikan layanan informasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Dengan semakin mudahnya akses informasi dengan menggunakan media sosial masyarakat telah terbiasa mencari berbagai informasi melalui perangkat komunikasi. Hal ini harus dimanfaatkan oleh BPOM di Kendari agar kelompok masyarakat pengguna perangkat informasi selalu mendapat pilihan informasi yang benar dan valid yang bersumber dari BPOM di Kendari.

Dari hasil survei kesadaran masyarakat, BPOM di Kendari juga dapat memilih komoditi apa yang akan lebih diprioritaskan untuk diperbanyak dan dilakukan lebih intensif. Komoditi Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dapat menjadi pilihan subyek/materi untuk melakukan KIE melalui berbagai media dan dengan target segmen masyarakat yang berbeda beda sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Kelompok milenial misalnya akan lebih tertarik dengan topik kosmetik dan suplemen Kesehatan sedangkan masyarakat pedesaan akan lebih tertarik dengan topik obat tradisional dan pangan. Pengemasan informasi yang menarik dan mudah dipahami harus menjadi bahan pertimbangan.

5. Analisis program / kegiatan yang Mendukung Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian adalah:

- a. Komunikasi , Informasi , Edukasi sebanyak 32 , Penyampaian Informasi melalui media sosial.
- b. Komunikasi , Informasi dan edukasi ke Ritel Modern dengan sasaran pelanggan yang berkunjung.



Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari diukur dengan tiga indikator yaitu:

- Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi / seminar .

Pelaku usaha mencakup produsen, distributor, importer, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey adalah :

- Aspek bimbingan dan pembinaan
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- Aspek penanganan saran dan masukan
- Aspek manfaat
- Aspek dampak

➤ Aspek pengetahuan dan pengembangan

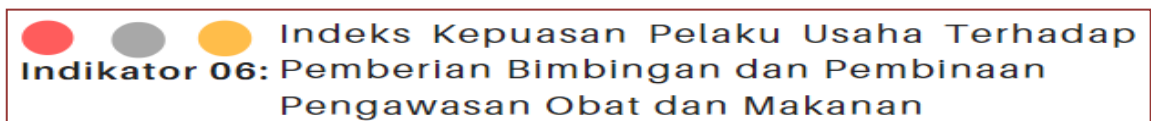
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tersebut adalah :

Dari Segi Bimbingan antara lain

- Advokasi dan Sosialisasi Balai POM ke Pemda, dalam rangka pengawasan obat dan makanan;
- Bimtek keamanan pangan UMKM;
- Pelayanan prima dan Bimtek e-registration pangan;
- Pengawasan PJAS dengan menggunakan mobil laboratorium keliling;

Kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha oleh BPOM adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan oleh BPOM ke pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (Regulatory asistency) berupa bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi / seminar, workshop / pelatihan / bimbingan teknis, asistensi / pendampingan / *coaching clinic*, konsultasi terhadap Pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan produk dalam rangka e-registrasi dan sertifikasi. Pelaku usaha mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan (RS, Puskesmas, Apotek dll) dan sarana lainnya seperti Ritel, stockiest dan depot.

Metode penelitian menggunakan teori *Customer Satisfaction* dengan parameter *Service Quality* (ServQual) yang meliputi : 1) Aspek *Tangible*, 2) Aspek *Realibility*, 3) Aspek Assurance, 4) Aspek Responsiveness dan 5) Aspek Emphaty. Survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi terhubung dengan BPOM Operation Center (BOC)



1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 19- Perbandingan Realisasi dengan Target (IKU.6)

Indikator Utama	Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
-----------------	---------	--------	-----------	-----------	----------

6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan makanan	83	0	0	0
---	----	---	---	---

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 belum ada nilai capaian karna nilai indeks tersebut pengukuranya di lakukan oleh Badan POM.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 20- Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024 (IKU.6)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Target sd 2024	Capaian thdp target 2024	Gap
6. Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	0	90	0	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan pada tahun 2021 belum ada nilai capaian karna nilai indeks tersebut pengukuranya di lakukan oleh Badan POM.

3. Faktor Penghambat / Pendukung tercapainya Kegagalan/ Keberhasilan

Pencapaian indeks ini didukung oleh pendampingan yang dilakukan Balai POM di Kendari terhadap pelaku usaha dalam rangka registrasi produk maupun sertifikasi sarana. Hambatan/ Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indeks kepuasan pelaku usaha yaitu materi yang disampaikan dirasa tidak efektif oleh pelaku usaha. Sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah penyampaian materi

lebih difokuskan pada materi yang berdampak langsung pada percepatan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan kategori baik antara lain :

- a. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan tetapi tidak disertai pemberian Link Survey seperti : Bimtek Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam Pemenuhan Standard dan Persyaratan, Bimtek Keamanan Pangan UMKM; Pelatihan Keamanan Pangan
- b. Pendampingan UMKM dan pelayanan konsultasi terhadap pelaku usaha via telepon/WA juga tidak diberikan Link Survei

4. Analisis program / kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian:

- a. Pemberian layanan konsultasi serta pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha akan lebih ditingkatkan
- b. Melaksanakan bimtek dan fasilitasi/pendampingan pelaku usaha UMKM.
- c. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring.

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada setiap triwulan, diperoleh hasil bahwa pelaku usaha yang terlibat proses registrasi di Badan POM merasakan manfaat bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Kendari. Petugas akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih responsif dan dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh pelaku usaha. BPOM di Kendari juga akan selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM agar proses pendaftaran, terutama untuk pelaku UMKM, terlaksana dengan cepat dan tepat.

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.

Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Pengukuran indeks dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM di Kendari dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 21- Perbandingan Realisasi dengan Kinerja Indikator 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
7. Indeks kepuasan masyarakat pengawasan Obat dan Makanan atas kinerja pengawasan	72	0	0	0

Target IKU ini adalah sebesar 69. Realisasi tahun 2021 belum ada hasil pengukuran dari Badan POM.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM di Kendari dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM di Kendari.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 22- Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024 (IKU.7)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s- d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
. Indeks kepuasan masyarakat pengawasan Obat dan Makanan atas kinerja pengawasan	0	92	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2021 belum ada hasil pengukuran dari Badan POM.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM di Kendari dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM di Kendari.

3. Analisis program / kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja.

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan :

- a. Melakukan Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Operasi Penanganan Dan Penertiban Produk Obat Dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan dilakukan secara rutin pada tahun 2021 untuk menekan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di pasaran dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Melakukan komunikasi yang baik dengan pemilik sarana terutama dalam melaksanakan pemeriksaan secara daring.
- d. Memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada pemilik sarana pada saat melakukan pengawasan.

 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Indikator 08: Layanan Publik

Paradigma pelayanan publik saat ini *new public services*, dimana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah. Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara real time.

Tujuan pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOMdi Kendari adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei

Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 23- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Indikator 8

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.5			

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada tahun 2021 belum ada nilai capaian karena pengukuran indeks tersebut dilakukan oleh Badan POM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BPOM di Kendari terhadap penerima layanan informasi dan pengaduan dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor)."

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 24- Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024 (IKU.8)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
8.IndeksKepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5	92		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capain untuk indikator tersebut belum ada karena pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh BPOM

Tabel diatas menunjukkan realisasi IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kendari sudah baik sama dengan Balai lainnya.

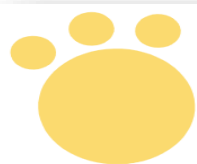
3. Faktor Penghambat/Pendukung terjadinya Kegagalan/ Keberhasilan

Balai POM di Kendari terus melakukan perbaikan dan perubahan melalui sistem, Mekanisme dan prosedur pelayanan layanan informasi dan Pengaduan Pelanggan/Konsumen dapat Datang langsung bertatap muka dan dimasa pandemic covid layanan dibuat dalam bentuk online. Prosedur pengisian Form disederhanakan dan waktu penyelesaian dibuatkan *time line* penyelesaian. Biaya dan tariff sesuai aturan Badan POM untuk pelaku usaha Mikro dikenakan 50%.

Kompetensi petugas pelayanan juga terus ditingkatkan, pelayanan diberikan dengan menggunakan prinsip pelayanan 5S. Untuk unsur layanan yang mengalami penurunan seperti unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dan unsur Sarana dan Prasarana, disebabkan BPOM Kendari melakukan perubahan layanan karena pandemi Covid-19 terjadi namun tetap melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang memerlukan pemeriksaan ke sarana sehingga tindak lanjut yang dilakukan dianggap tuntas.

Selama masa pandemi beberapa sarana dan prasarana pelayanan publik dialihkan ke ruang yang lebih terbuka untuk mencegah dan memutus mata rantai pencegahan Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menjadi kendala dan tantangan bagi BalaiPOM di Kendari dalam rangka memberikan layanan

publik yang maksimal kepada masyarakat. Aktivitas konsultasi/layanan informasi secara tatap muka masih belum bisa dilaksanakan dan dialihkan secara online melalui telepon, email, aplikasi whatsapp, Instagram, dan lain-lain. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena di masa pandemi seperti ini kebutuhan akan layanan informasi terkait Obat dan Makanan masih dapat dipenuhi oleh Balai POM di Kendari, ditunjukkan hasil perolehan SKM unit 88.54.

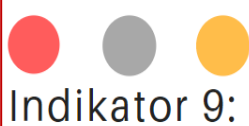


Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Lingkup Balai POM di Kendari

SASARAN KEGIATAN 4

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Lingkup Balai POM di Kendari diukur melalui 6 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
6. Indeks Pelayanan Publik.



Indikator 9: Persentase keputusan/rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Persentase keputusan / rekomendasi hasil sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dilihat dari rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh sarana produksi dan disitribusi. Rekomendasi yang diterbitkan Balai POM di Kendari merupakan hasil pengawasan terhadap pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / pencabutan izin / pencabutan nomor izin edar, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi,

sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Indikator terdiri dari 4 komponen yaitu :

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang di tindak lanjuti / dilaksanakan oleh UPT / jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%.
- b. Persentase Rekomendasi hasil Inspeksi yang di terbitkan oleh Pusat / yang dilaksanakan oleh UPT tindak lanjuti /dilaksanakan oleh Pusat / UPT.
- c. Persentase Rekomendase dan pemangku kepentingan terkait yang di tindak lanjuti / dilaksanakan oleh UPT , cara perhitungan (jumlah rekomendasi dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh UPT / jumlah Rekomendasi yang diterima lintas sektor terkait x 100%)

Persentase keputusan / rekomendasi hasil sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dilihat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Keputusan Rekomendasi Yang Diterbitkan}}{\text{Keputusan Rekomendasi Yang Dilaksanakan}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 25- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja (IKU.9)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
8.Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	53	0	0	

Selama tahun 2021, keputusan / rekomendasi hasil sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan ditargetkan sebesar 53 % realisasinya dari indikator tersebut belum ada .

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 26- Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024 (IKU.9)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
9. Persentase keputusan / rekomendasi hasil sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0	95	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target, nilai capaian dari indikator tersebut belum ada

3. Faktor Penghambat/Pendukung tercapainya Kegagalan/Keberhasilan

Adapun faktor pendukung dalam capaian tersebut antara lain :

- Penyusunan dan penyampaian keputusan/rekomendasi yang tepat waktu oleh petugas pengawas.
- Penyampaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mencantumkan permohonan untuk memberikan feedback secara tertulis kepada Balai POM di Kendari,
- Menjalin komunikasi intensif dengan dinas terkait melalui staf penanggung jawab untuk memonitoring pelaksanaan keputusan/rekomendasi yang telah diterbitkan.
- Melakukan monitoring secara berkala terkait diterimanya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan *feedback* yang dilakukan.

Faktor Penghambat/ Kendala yang Dihadapi

Dari keputusan/ rekomendasi yang diterbitkan Balai POM di Kendari, masih ada yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan :

- Masih ada pelaku usaha yang tidak peduli terhadap keputusan / rekomendasi yang diberikan, khususnya sarana-sarana yang memiliki akses yang jauh dari Balai POM di Kendari.
- Masih ada beberapa rekomendasi yang tidak sampai ke sarana karena alamat sarana tidak detail sehingga pengantar surat tidak menemukan sarana tersebut.

4. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Menindak lanjuti rekomendasi hasil inspeksi.
- b. Menindak lanjuti rekomendasi yang di terbitkan oleh Pusat

 Indikator 10: **Persentase Keputusan/rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor/pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal,KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Rumus perhitungan:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder $= (A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yangdiberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yangdiberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM di Kendari kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, baik yang memenuhi Ketentuan maupun tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku

usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada 2020 Balai POM di Kendari telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 168 surat rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 175 sarana. yang ditindaklanjuti sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 27- Perbandingan Realisasi dengan Target (IKU.10)

Indikstor Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
10.Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	62.3	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk tahun 2021 belum ada nilai capain.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 28- Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024 (IKU.10)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d	Capaian thd Target	GAP
-------------------------	-----------	------------	--------------------	-----

		2024	2024	
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0	85		

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Realisasi tahun 2021 belum ada nilai capaian.

3. Faktor Penghambat/Pendorong tercapainya Kegagalan/Keberhasilan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja dari indikator ini salahsatunya ialah karena masih belum maksimalnya feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor / pemerintah daerah terhadap keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai.

4. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang tercapainya Kegagalan / Keberhasilan pencapaian kinerja.

- Advokasi ke stake holder terkait *feed back* Rekomendasi
- Pemanggilan/Pembahasan khusus terhadap pemilik/ penanggung jawab sarana.

 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Indikator 11: yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

- Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar 5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga Rumus Perhitungan : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = (Jumlah keputusan

penilaian sertifikasi* yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi*) x 100% Catatan: *

Kendala yang dihadapi adalah Pelaku usaha belum memahami cara penyusunan standar dokumen yang harus tersedia; Perbaikan terhadap Temuan (CAPA) hasil pemeriksaan sarana agak lama, sehingga perlu keaktifan petugas dalam mengingatkan pelaku usaha dalam memperbaiki temuan ketidaksesuaian.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 29 - Perbandingan Realisasi dengan Kinerja (IKU.11)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86	100	116.27	Sangat Baik

Target IKU ini yang mulai dilakukan pengukuran pada sebesar 86,00%. Dari tabel di atas diketahui realisasi indikator kinerja sebesar 100 persen, dengan capaian 116.27 dengan kriteria sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 30- Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024 (IKU.11)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	97	119.86	- 3

Berdasarkan tabel diatas realisasi tahun 2021 sebesar 100 persen. Target hingga tahun 2024 sebesar 97 sehingga capaian terhadap target 2024 119.86 dengan GAP -3

3. Faktor Penghambat/Pendorong tercapainya Kegagalan/Keberhasilan

Penerbitan Sertifikasi LHU dari pihak KE-3 baik dari Dinas Kesehatan ,kepolisian UMKM terkadang melewati time line karena pandemic Covid-19 tapi diberlakukan WFO dan lembur bagi petugas laboratorium.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain.

- a. Melakukan pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- b. Melakukan pemeriksaan produksi pangan dalam rangka registrasi produk.
- c. Melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional dalam rangka CPOTB Bertahap.
- d. Melakukan Pendampingan UMKM dalam rangka Pemberian Pelayanan Prima untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Produk (Pangan) dan Sertifikat CPOTB Bertahap
- e. Menerima sampel pihak ketiga sampai dengan 22 Desember 2020.

  	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
---	---

Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari yang menerapkan cara produksi obat dan makanan yang baik. Data untuk perhitungan IKU ini berdasarkan hasil

pengawasan sarana produksi yang dilakukan Balai POM di Kendari dan Loka POM Baubau.

Rumus Perhitungan:

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:
(Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 31- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target (IKU.12)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50	50	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator Presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sudah baik karena berada di atas target yang ditentukan.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 32 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra 2020-2024 (IKU.12)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	80	63	17.5

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar persen masih jauh dari target 2024 yakni 63 persen. Sehingga dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih signifikan agar nilai tersebut dapat meningkat di periode berikutnya.

3. Analisa Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang akan dilakukan Balai POM di Kendari untuk meningkatkan target kinerja di tahun selanjutnya antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan substansi Infokom untuk melakukan bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik pada sarana yang menjadi target pengawasan
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor/stakeholder untuk melakukan pendampingan kepada sarana produksi tentang cara produksi pangan olahan yang baik dan melakukan advokasi dengan Dinas Kesehatan melalui DAK pengawasan Obat dan Makanan yang telah diberikan oleh Badan POM.

 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Indikator 13: Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :
(Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan
dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%*

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- b. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Table 33- Sarana Distribusi yang Diperiksa

No	Sarana Distribusi	UPT	Total		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Kendari	11	2	9
		TOTAL	12	2	10
2	Apotek	Kendari	75	24	51
		TOTAL	92	26	66
3	Toko Obat	Kendari	15	6	9
		TOTAL	20	6	14
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi	Kendari	9	5	4
		TOTAL	14	5	9
5	Rumah Sakit (RS)	Kendari	9	9	0
		TOTAL	12	9	3
6	Puskemas	Kendari	26	13	13
		TOTAL	34	15	19
7	Klinik	Kendari	5	2	3
		TOTAL	8	3	5
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kendari	0	0	0
		TOTAL	0	0	0

9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kendari	34	28	6
		TOTAL	44	37	7
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kendari	11	11	0
		TOTAL	16	16	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kendari	67	36	31
		TOTAL	93	50	43
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Kendari	141	99	42
		TOTAL	166	108	58
	Kendari		403	235	168
	Kota Baubau		108	42	66
	TOTAL		511	277	234

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 34- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target (IKU.13)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	79.82	133	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja BPOM di Kendari untuk tahun 2021 realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 35 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra 2020-2024 (IKU.13)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target	GAP
-------------------------	-----------	-----------------	--------------------	-----

			2024	
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79.82	81	98.54	1.72

Berdasarkan tabel diatas realisasi tahun 2021 sebesar 79.82 persen. Target hingga tahun 2024 sebesar 81 sehingga capaian terhadap target 2024 sebesar 98.54% persen dengan kriteria Baik.

3. Analisis Penyebab / Keberhasilan / Kegagalan atas peningkatan kinerja / penurunan kinerja

Petugas lapangan telah memastikan bahwa pemilik sarana telah menerapkan cara distribusi obat yang baik dan cara distribusi pangan yang baik, tetapi masih di tentukan yang TMK. Alternarif solusi adalah pemberian edukasi dan pembinaan dalam rangka cara distribusi obat yang baik dan cara distribusi pangan yang baik.

4. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi obat tentang cara distribusi obat yang baik di daerah
- Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansial Informasi dan Komunikasi untuk bekerjasama dengan Fasilitator Keamanan Pangan dalam rangka pembinaan sarana distribusi Obat (Diipastikan dengan Infokom kegiatan yg bisa diikuti)

Indikator 14: Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Cara perhitungan indikator ini

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

Table 36- Kategori Nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 37- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target (IKU.14)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
14. Indeks Pelayanan Publik	3.76			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Target Indeks Pelayanan Publik untuk Periode akhir 2021 adalah 3,76 dan realisasi realisasi dari indikator tersebut belum ada karena pengukuran dilakukan oleh Badan POM

Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 38- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra (IKU.14)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
14. Indeks Pelayanan Publik	3.76	4.51		

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja BPOM di Kendari pada tahun 2021 dan realisasi realisasi dari indikator tersebut belum ada karena pengukuran dilakukan oleh Badan POM

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini antara lain:

- Penilaian Survei Indeks Pelayanan Publik tergantung persepsi individu yang menerima layanan.
- Tidak semua masyarakat yang menerima layanan memiliki smartphone android sehingga tidak semua pelanggan dapat mengisi survei dengan metode online.

Rencana Tindak Lanjut antara lain :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana.
- Menyiapkan metode survei yang lainnya agar semua masyarakat dapat memberikan penilaian mengenai kualitas pelayanan.

3. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan antara lain :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Pengisian survey
- melalui aplikasi simolekdesi



Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,
Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Lingkup
Balai POM di Kendari
SASARAN KEGIATAN 5

Sasaran Startegis tersebut diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
- b. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- c. Jumlah desa Pangan Aman
- d. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

 Tingkat Efektifitas
Indikator 15: KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan dan merupakan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP (Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan) Badan POM.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 39- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target (IKU.15)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.28			

Target IKU Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Kendari pada tahun 2021 sebesar 91.28 dengan realisasi belum ada karena indikator tersebut pengukurannya dilakukan oleh badan POM .

Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 40- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra 2020-2024 (IKU.15)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		92.81		

Berdasarkan data dia atas diketahui bahwa realisasi kinerja BPOM di Kendari pada tahun 2021. Nilai capaian belum ada

2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi :

- Melakukan KIE di wilayah kerja Balai POM di Kendari
- Penyampaian informasi melalui media sosial

3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Rencana Tindak Lanjut yang sudah dilakukan yaitu:

- Mempersiapkan kuisioner bagi peserta KIE yang lebih spesifik berkaitan dengan materi yang diberikan untuk mengukur pengetahuan yang diperoleh saat selesai penyampaian materi oleh narasumber. Kuisioner tidak hanya terbatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dengan berbagai media.
- c. Memberikan gimmick edukasi bagi peserta KIE yang mengisi survei melalui aplikasi secara cepat.

Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan

Indikator 16: Anak Sekolah (PJAS) Aman

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa danguru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya Sekolah yang dilakukan Intervensi Keamanan PJAS terdiri dari SD/M SMP dan SMA.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 41- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target (IKU.16)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	Progres 5 %		

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja BPOM di Kendari pada tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 40

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 42- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra 2020-2024 (IKU.16)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
16. Jumlah sekolah dengan PanganJajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Progres 5 %	104		

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator **16 masih cukup rendah jika dibandingkan dengan target 2024. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja di periode berikutnya.**

3. Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan ataupun Peningkatan / Penurunan kinerja :

- Melakukan Advokasi kepada lintas Sektor
- Identifikasi Sekolah yang akan diintervensi

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Rencana Tindak Lanjut yang telah dilakukan untuk mencapai Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai POM di Kendari yaitu:

- Karena masa pandemi Covid-19, dilakukan intervensi mengikuti Petunjuk Teknis PJAS New Normal. Memberikan pendampingan dan pembinaan secara intensif ke tiap sekolah yang diintervensi.
- Petugas BPOM di Kendari turun langsung ke sekolah mendampingi kader keamanan pangan sekolah untuk melakukan sosialisasi keamanan pangan bagi komunitas sekolah.
- Pendampingan bagi para kader keamanan pangan sekolah untuk mendapatkan sertifikasi sekolah dengan PJAS aman Level 1.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa yang diintervensi meliputi desa maju dan berkembang, desa yang menjadi bekas intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian, Desa Pembangunan daerah dan desa di daerah destinasi wisata, Desa maju adalah Desa dengan DM $> 0,707$ dan $< 0,815$, desa berkembang adalah desa dengan DM $> 0,599$ dan $< 0,707$, IDM adalah indeks desa yang merupakan komposisi dimensi ketahanan social, ekonomi dan ekologi'.

Target Desa telah dilakukan pengurangan terhadap intervensi desa pangan aman dari 6 desa menjadi 4 desa yaitu Desa Lambusa, Desa Arongo di Kabupaten Konawe Selatan, Desa Konaweaha dan Kel Dawi - Dawi di Kabupaten Kolaka, sampai pada triwulan IV tahun 2020 capaian sesuai progres kegiatan sudah mencapai 100 %.

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya.

- a. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman/implimentasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.
- b. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi, komitmen pemuda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar

aman dari bahan berbahaya serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.

Komitmen dari dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang dilaksanakan dalam pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawasan pada bahan berbahaya dan rencana program pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Kriteria pasar aman meliputi :

- a. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.
- b. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 43- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target (IKU.17)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
17. Jumlah desa pangan aman	12	0	Progres 5 %	Baik

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi dan capaian desa tahun 2021 sebesar (6 Desa) jika dibandingkan dengan target desa dengan kategori

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 44- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra (IKU.17)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
17. Jumlah desa pangan aman	Progres 5 %	32		

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian tahun 2021 jika dibandingkan dengan target Renstra masih rendah yaitu dengan capaian 12,50 % hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi target 32 pada akhir periode perlu dilakukan reviu terhadap target agar bisa tercapai dengan baik.

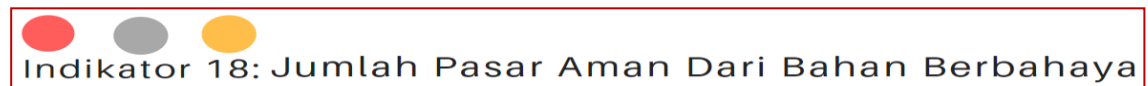
3. Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan ataupun Peningkatan / Penurunan kinerja :

- a. Melaksanakan advokasi kepada lintas sektor terkait.
- b. Melakukan identifikasi sekolah yang akan diberikan intervensi.
- c. Melakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja, maka dilakukan langkah-langkah berikut ini :

- a. Melakukan Fasilitasi Keamanan Pangan bersama kader keamanan pangan di sarana komunitas yang telah mendapatkan bimtek keamanan pangan
- b. Melakukan pemberian gimmick edukasi keamanan pangan kepada kader, komunitas, dan tim keamanan pangan desa.



1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 45- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target (IKU.18)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	Progress 5%		

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk Indikator 18 Balai POM di Kendari sudah sesuai dengan target yaitu 2.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

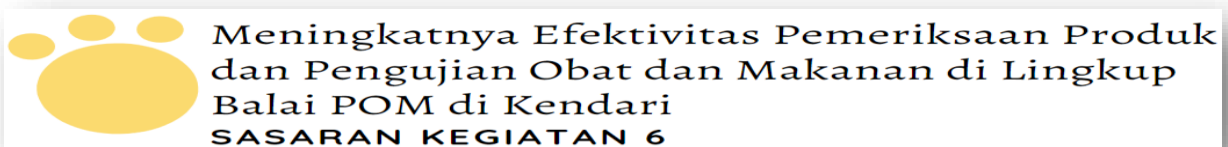
Table 46- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra (IKU.18)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Progress 5%	17		

Dari tabel diatas menunjukan bahwa perbandingan realisasi tahun 2020 dengan perbandingan target periode akhir renstra masih cukup rendah dengan GAP 15, hal ini dapat di simpulkan bahwa untuk memenuhi target pada periode akhir renstra perlu pencermatan yang lebih baik lagi atau bahkan bisa mereview target tersebut.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Melaksanakan Penyuluhan kepada komunitas pasar di daerah
- Melakukan monitoring dan evaluasi tahap 1 dan 2 (sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya)



Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan dua indikator yaitu :

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

   Persentase Sampel Obat yang Diperiksa Indikator 19: dan Diuji Sesuai Standar

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 47 - Realisasi Indikator Kinerja (IKU .19)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	42.83	46.55%	Sangat Kurang

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai realisasi sebesar 42 % dengan capaian 46.55 % . Pencapaian ini kalau dibanding target tahunan belum memenuhi target karena perhitungan di atas berpengaruh dengan jumlah sampel yang diuji .

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan Obat yang dimaksud obat adalah obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

A + B

A : Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan dikali 100%.

B : Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan dikali 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 48 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Renstra (IKU .19)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	42.83	94	45.56	54.44

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi terhadap target renstra dengan realisasi 42.83 % dengan GAP – 54.44, hal ini dapat disimpulkan bahwa pada akhir periode renstra target tersebut akan tercapai atau bahkan melebihi target

3. Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan ataupun Peningkatan / Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi :

- Peningkatan kompetensi petugas laboratorium dan pemeriksaan secara konsisten.
- Pembelian sampel sesuai prioritas sampling.
- Pemberian edukasi, pembinaan dan penindakan jika pelaku usaha melanggar ketentuan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Rapat Internal kinerja yang dilakukan setiap triwulan dalam penyusunan laporan kinerja triwulan untuk membahas kendala dan solusi pada tahun berjalan dalam pencapaian IKU pada bulan April, Juli dan Oktober tahun 2020.
- Pengawasan Produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan secara rutin pada tahun 2020 untuk menekan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di pasaran dalam wilayah provinsi Sulawesi tenggara

 Persentase Sampel Makanan yang
Indikator 20: Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk mengukur pemenuhan sample makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

A + B

A : Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan dikali 100%.

B : Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan dikali 100%.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 49 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target (IKU .20)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86	98.83	116.27	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sudah masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai realisasi sebesar 98.83 dari target 86 sampel dengan nilai capaian sebesar 116,27%. Tercapainya indikator ini didukung oleh adanya peningkatan kompetensi petugas sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 50 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target Renstra (IKU .20)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,83	94	105,14%	4,83

Dari data di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar sudah baik karena berhasil melampaui target 2024 yaitu sebesar 98,83%.

3. Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan ataupun Peningkatan / Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi :

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya kinerja tersebut antara lain karena kompetensi petugas pengujian dan pengawasan yang semakin meningkat.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi target IKU sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- Melakukan perencanaan pengadaan reagen media, peralatan laboratorium serta peningkatan kompetensi penguji.
- Melakukan pengujian sampel sesuai dengan pedoman sampling.



Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan
Obat dan Makanan Lingkup BPOM di Kendari
SASARAN KEGIATAN 7

Sasaran strategis tersebut hanya di ukur dengan satu indikator seperti tertera di bawah ini.

 Persentase Keberhasilan Penindakan
Indikator 21: Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk mengukur persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sesuai tahapan penindakan. Tahapan penindakan antara lain;

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan)
- b. Tahap I penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- c. P2L (Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap) oleh Jaksa Penuntut Umum.
- d. Penyerahan tersangka kepada JPU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 51 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target (IKU .21)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	2.14		

Dari data di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sudah baik karena sudah sesuai realisasi.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 52 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Renstra(IKU .21)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	95		

Dari data di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sudah baik namun masih tetap harus ditingkatkan agar mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 95.

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini antara lain.

- Adanya Pandemi Covid menyebabkan penelusuran sumber produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan dan penyidikan menjadi terhambat
- Adanya wabah virus COVID-19 menyebabkan pembatalan kegiatan pertemuan yang bersifat teknis.
- Kegiatan Penyidikan terganggu karena adanya pandemi Covid-19, sehingga penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang cukup lama.



Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan BPOM di
Kendari yang Optimal
SASARAN KEGIATAN 8

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan dua indikator yaitu :

- Indeks RB UPT Balai POM di Kendari
- Nilai Akip Balai POM di Kendari



Indikator 22: Indeks RB BPOM di Kendari

Berdasarkan PERMAN PAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB 52 tahun 2014 tentang {edoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi

- a. Zona Integritas adalah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui informasi /birokrasi
- b. Menuju Wilayah Bebas dari korupsi yang selanjutnya disingkat menuju WBK predikat yang diberikan kepada suatu satker kepada suatu satker / unit kerja dari BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, [enataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c. Menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja BPOM/BBPOM yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Perubahan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, dan Penguatan Kualitas Pelayanan PUBLIK

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 53 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target (IKU .22)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
22. Indeks RB BPOM di Kendari	89	0	0	0

Dari tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja dari indikator Indeks RB BPOM di Belum ada karena indikator tersebut hasil pengukuran dari BPOM

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 54 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Renstra (IKU .22)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target 2024	s.d	Capaian thd Target 2024	GAP
22. Indeks RB BPOM di Kendari	89	95			

Dari tabel diatas menunjukan bahwa realisasi tahun 2021 belum ada nilai capaian

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan Kompetensi dengan mengikuti :

- Pelatihan pelayanan publik
- Workshop dan capacity building oleh tim Motivator,



1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 55 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target (IKU .23)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
23. Nilai AKIP BPOM di Kendari	84			

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja BPOM di Kendari belum ada capaian

Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 56 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Renstra (IKU .23)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
23. Nilai AKIP BPOM di Kendari		92		

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja BPOM di Kendari

Belum ada capaian

2. Analis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatkan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telh dilakukan

Belum tercapainya target IKU Nilai AKIP BPOM di tahun 2020 disebabkan karena pelaksanaan SAKIP yang belum optimal antara lain :

a. Perencanaan Kinerja :

Dokumen Rencana Strategis Balai POM di Kendari periode 2020-2024 telah dibuat dan dipublikasikan pada website Badan POM. Rencana strategis telah memuat tujuan dan ukuran keberhasilan dijabarkan sebagai indikator sasaran strategis dan telah terdapat target pada masing masing indikator. Masih diperlukan beberapa perbaikan diantaranya terkait penentuan target kinerja belum berdasarkan data yang memadai dan kajian analisis yang logis serta RAPK belum mencantumkan komponen dan subkomponen kegiatan yang diformalkan

b. Pengukuran Kinerja :

Telah terdapat PK untuk eselon III dan IV dan mekanisme pengumpulan data kinerja. *cascading* kinerja telah dilakukan sampai dengan eselon III dan IV, namun belum diformalkan.Selain itu perlu dilakukan penyusunan *cascading* sampai dengan level individu berdasarkan level diatasnya,Upaya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk pemberian reward and punishment terkait

capaian kinerja juga belum dilakukan secara optimal. Untuk mekanisme pengumpulan data kinerja belum dibuat SOP secara khusus bagaimana alurnya sehingga masih belum sepenuhnya mengakomodir seluruh kriteria yang ditetapkan misalnya kemudahan penelusuran data yang valid, kemudian akses data serta mekanisme yang dilakukan apabila terjadi kesalahan data, Selain itu kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja masih belum diakomodir oleh aplikasi e - performance.

c. Pelaporan

Laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, Namun perbaikan perencanaan serta peningkatan kinerja yang disajikan dalam informasi kinerja belum didokumentasikan secara memadai. Selain itu pemanfaatan laporan kinerja untuk menilai keberhasilan kegiatan dan perbaikan yang akan dilaksanakan juga belum terdokumentasi secara memadai, Salah satu manfaat penyusunan laporan kinerja yang dapat digunakan unit adalah untuk menyimpulkan kinerja yang selanjutnya dapat digunakan dalam pemberian reward and punishment

d. Evaluasi Internal

Proses pelaksanaan evaluasi internal sudah dilaksanakan dengan baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, salah satunya dengan Adanya evaluasi internal sesuai dengan pedoman evaluasi internal dari Biro perencanaan dan Keuangan dimana masing masing unit wajib untuk melaksanakan tahapan tersebut, Agar lebih meningkatkan capaian komponen evaluasi internal BPOM di Kendari dapat secara konsisten melengkapi laporan evaluasi internal dengan kertas kerja dan notulen rapat yang disertai dengan kendala /keberhasilan dan rencana aksi serta memanfaatkan hasil evaluasi internal dan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja dan menilai keberhasilan kegiatan serta usulan perbaikan program ke pusat termasuk dengan evaluasi dan bukti pencapaiannya.

e. Capaian Kinerja

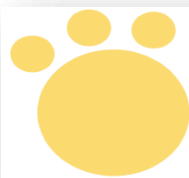
Secara keseluruhan nilai capaian kinerja BPOM di Kendari mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Namun ada beberapa indikator yang mengalami penurunan capaian hal ini terjadi karena beberapa

capaian target mengalami penurunan dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian target kinerja lebih baik, Untuk meningkatkan capaian kinerja ditahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan melaksanakan pemanfaatan rencana aksi dan laporan internal dalam rangka pemanfaatan kinerja dan memaksimalkan upaya perbaikan, Meningkatkan keandalan data kinerja yang disajikan dengan data kinerja yang mampu terukur dan andal serta dilengkapi dengan data dukung yang tepat.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai Nilai AKIP Balai POM di Kendari , pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan antara lain :

- a) Penetapan Dokumen Renstra Balai POM Kendari periode 2020 - 2024
- b) Melakukan pengumpulan data kinerja secara on line pada site Tata Usaha Balai POM Kendari secara rutin setiap bulan.
- c) Melakukan Evaluasi Triwulan Capaian Kinerja di tahun 2020 yang dimonitoring langsung oleh pimpinan yang dituangkan dalam Laporan Kegiatan Evaluasi Internal.
- d) Membuat Laporan Kinerja Interim Balai POM Kendari setiap triwulan.
- e) Melakukan perbaikan terhadap kinerja yang belum tercapai berdasarkan pengukuran setiap triwulan dan monitoring terhadap rencana aksi tindak lanjut.



Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang
Berkinerja Optimal
SASARAN KEGIATAN 9



Indeks Profesionalitas ASN BPOM di
Indikator 24: Kendari

Indeks profesionalisme ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian klasifikasi kinerja dan kedisiplinan pegawai berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalisme ASN diukur berdasarkan PERMEN PAN RB 2018 tentang pengukuran indeks profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalisme ASN diukur dengan menggunakan 4 dimensi yaitu :

- ✓ Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
- ✓ Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
- ✓ Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- ✓ Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dipahami.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 57 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target (IKU .24)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
24. Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kendari	77			

Dari tabel diatas menunjukan bahwa target IKU Indeks profesionalitas ASN UPT pada tahun 2021 adalah 77 sedangkan realisasi IKU belum ada karena capaian indikator tersebut pengukuranya dilakukan oleh BPOM

Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 58 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Renstra (IKU .24)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
24. Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kendari		85		

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2021 untuk indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kendari belum ada nilai capaian

2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan ataupun penurunan pencapaian kinerja

Nilai realisasi indeks profesionalitas ASN UPT berdasarkan surat dinas Kepala Biro Umum dan SDM Badan POM RI nomor B-KP.09.24.241.01.21.24 tanggal 25 Januari 2021 dengan nilai realisasi 82,5 melebihi target awal sebesar 75 dengan capaian 110 persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan partisipasi pegawai dalam mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi secara daring di masa Pandemi Covid-19. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indeks profesionalitas ASN ini antara lain:

- ✓ Adanya wabah Covid-19 menyebabkan penundaan/pembatalan kegiatan bimtek, magang, pertemuan yang bersifat teknis.
- ✓ Tidak semua pegawai dapat mengikuti pelatihan yang sama pada waktu bersamaan karena kuota setiap Balai terbatas

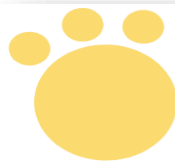
Upaya yang dilakukan Balai POM di Kendari untuk mencapai target IKU ini adalah:

1) Mengikuti bimtek dan pertemuan yang bersifat teknis secara online 2) Mengikuti pelatihan secara online disatu tempat, kemudian mengisi daftar hadir sebagai data dukung 3) Pegawai Balai POM di Kendari mengikuti pengembangan kompetensi secara daring.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama ini antara lain:

- a. Laporan rutin pegawai BPOM di Kendari yang rutin setiap bulan
- b. Monitoring setiap kehadiran pegawai.
- c. Pengukuran SKP setiap triwulan
- d. Aktif mengikuti program pengembangan kompetensi pegawai
- e. Penerapan kode etik dan budaya organisasi yang konsisten
- f. Mengevaluasi setiap kehadiran pegawai setiap pekan.



Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

SASARAN KEGIATAN 10

Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 2 indikator yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kendari yang optimal

   **Persentase Pemenuhan Laboratorium**
Indikator 25: Pengujian Obat dan Makanan Sesuai
Standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Laboratory* (GLP) yang meliputi parameter : Standar Alat Laboratorium dan Standar Kompetensi personel Laboratorium.

Batas minimal GLP adalah 70 % dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Standar Ruang Lingkup >65
- b. Standar kompetensi laboratorium >75
- c. Standar Alat Laboratorium > 70

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 59 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target (IKU .25)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73			

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 60 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target Renstra (IKU.25)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		86		

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama tahun 2021 terhadap tahun 2024. Data capaian di atas belum ada karena indikator tersebut pengukurannya dilakukan pada akhir tahun

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum tercapainya target IKU “Presentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP” pada tahun 2020 karena:

- ✓ Pada saat penetapan target IKU, masih menggunakan standar GLP target IKU 2015-2019. Namun saat penilaian 2020, digunakan standar GLP terbaru 2020-2024.
- ✓ Realokasi anggaran untuk pengadaan alat laboratorium untuk penanganan covid-19.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- ✓ Mengajukan permintaan penambahan personil pengujian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
 - ✓ Melakukan koordinasi antara petugas sampling dengan laboratorium untuk sistem Sampling Acak yang ada di pedoman sampling agar bisa dilaksanakan dengan baik terkait sampel yang akan masuk di laboratorium.
 - ✓ Mengajukan permintaan untuk pemenuhan baku pembanding yang tidak tersedia di P3OMN.
 - ✓ Berkoordinasi dengan P3OMN terkait dengan pengadaan instrumen LC MS MS.
- 6.7.5. Membuat perencanaan uji untuk memenuhi Standar Ruang Lingkup yang baru dengan mempertimbangkan Pedoman Sampling dan jumlah personil

 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
Indikator 26: BPOM di Kendari yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup :

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, yang dimaksud dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. BCC adalah suatu/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan analisa.
- c. Tujuan data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi dalam BSC yang harus dimutakhirkan adalah :
 - UPT : SIPT, SPIMKER, Data Keracunan
 - Unit Kerja Pusat sesuai data kinerja masing-masing

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 61 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target (IKU.26)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
26. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal	2			

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja BPOM di Kendari pada tahun 2021 belum ada nilai capaian karna indikator tersebut dilakukan oleh BPOM

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 62 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target Renstra(IKU.26)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal		3		

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator Indeks Pengelolaan data dan Informasi BPOM di Kendari masih perlu ditingkatkan agar mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 3

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Balai POM di Kendari, antara lain:

- a. Pengisian SIPT versi 3.0, sehingga menghambat pemutakhiran SIPT di Balai POM di Kendari. Kendala yang dihadapi antara lain:
 - ✓ Beberapa sampel tidak bisa dilakukan input parameter uji pada role Deputi MT Pengujian sehingga tidak bisa dialirkan ke Penyelia Pengujian,
 - ✓ Melaporkan kepada Kepala PUSDATIN untuk melakukan perbaikan sistem pada SIPT Pengujian sesuai yang tercantum dalam lembar monitoring SIPT
- b. Belum adanya aplikasi atau website yang dijadikan pusat data dan informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai BPOM di Kendari.



Terkelolanya Keuangan BPOM di Kendari Secara Akuntabel
SASARAN KEGIATAN 11

Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan dua indikator yaitu :

- a. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari
- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Kendari



Indikator 27: Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari

Nilai kinerja anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker /UPT yang diperoleh dari Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, 13 indikator tersebut ialah :

- a. Revisi DIPA
- b. Devisi halaman III DIPA
- c. Pengelolaan UP
- d. Rekon UP Bendahara
- e. Data Kontrak
- f. Penyelesaian Tagihan
- g. Penyerapan Anggaran

- h. Return SP2D
- i. Perencanaan Kas
- j. Pengembalian / Kesalahan SPM
- k. Dispensasi / Penyampaian SPM
- l. Pagu Minus
- m. Konfirmasi Capaian Output

1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Table 63 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja (IKU.27)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
27 .Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari	94	97,13		

Dari tabel di atas diketahui untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran sudah baik karena realisasinya sudah mencapai 97,13% dari target 93,40% dengan persentase nilai capaian sebesar 103,99%. Meskipun demikian, hasil ini masih bisa ditingkatkan lagi agar mendapatkan kriteria Sangat Baik di periode berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024

Table 64 - Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Renstra (IKU.27)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target s.d 2024	Capaian thd Target 2024	GAP
27 .Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari		97		

Dari tabel di atas diketahui untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran sudah baik karena sudah sesuai dengan target Renstra 2024.

3. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian antara lain:

- a. Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran setiap triwulan
- b. Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Indikator 28: BPOM di Kendari

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut: Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien. Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) adalah suatu media untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja suatu instansi dengan membandingkan output dan input suatu kegiatan. Pada tahun 2021 terdapat terdapat 16 enam belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kendari yang muaranya mendukung program Nasional. Adapun Program Nasional yang dimaksud adalah :

- a. Sampel obat, sampel makanan
- b. Desan Pangan Aman
- c. Pasar Aman
- d. Perkara
- e. Sarana Distribusi
- f. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

1. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kendari tahun 2021 tertuang dalam DIPA Balai POM di Kendari nomor : DIPA-2021 -063. 01. 2. 432932/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar **Rp 22.849.992.000.00** (dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Untuk Realisasi Anggaran sampai bulan maret Tahun 2021 Balai POM di **3.074.026.473.00** dengan presentase 13,45 . untuk realisasi per output dapat dilihat pada tabel berikut:

MATRIKS REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT JANUARI SAMPAI MARET 2021

DR Program Pengawasan Obat dan Makanan					11.561.689.000.00
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					11.561.689.000.00
No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran		
			Target Pagu RO	Realisasi	Capaian %
1	ADD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	1.134.237.000.00	122.301.202.00	10.78
2	AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM (Laporan)	83.721.000.00	0	0

3	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM (Keputusan)	74.042.000.00	3.866.000.00	5.22
4	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (Orang)	600.000.000.00	7.536.699.00	1.26
5	BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	858.647.000.00	21.571.900.00	2.51
6	BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM (Layanan)	124.000.000.00	12.180.800.00	9.82
7	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Paket)	3.136.438.000.00	2.740.000.00	0.09
8	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	103.000.000.00	71.760.700.00	69.67
		003 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	191.452.000.00	0	0
9	QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Persen)	685.377.000.00	81.299.400.00	11.86
10	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	711.488.000.00	0	0

11	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	888.554.000.00	7.725.000.00	0.87
12	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	256.074.000.00	0	0
13	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen)	502.060.000.00	31.931.410.00	6.36
14	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM (Persen)	809.900.000.00	57.809.490.00	7.14
15	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM (Persen)	26.390.000.00	10.412.600.00	39.46
16	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen)	71.540.000.00	6.784.792.00	9.48
17	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen)	1.304.769.000.00	44.227.883.00	3.39
			11.561.689.000.00	482147876	
18	6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM				
	6384.EAA Layanan Perkantoran		11.288.303.000.00	2591878597	22.96
	004 Layanan Perkantoran UPT		11.288.303.000.00		

Total Target / Realisasi Output				
Total Pagu / Realisasi Anggaran		22.849.992.000.00	3.074.026.473.00	13.45

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan sasaran strategis, program, kegiatan, dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil perhitungan dan analisa kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kendari tahun 2021 tertuang dalam DIPA Balai POM di Kendari nomor : DIPA-2021 -063. 01. 2. 432932/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar **Rp 22.849.992.000.00** (dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
2. Untuk Realisasi Anggaran sampai bulan maret Tahun 2021 Balai POM di **3.074.026.473.00** dengan presentase 13,45
3. Capaian kinerja organisasi yang terdiri atas 11 (sebelas) sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja yang telah ditetapkan , dari 11 sasaran strategis masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum ada karena pengukurannya dilakukan oleh BPOM

1.2 Permasalahan dan Kendala Utama

Adanya pandemi covid 19 sehingga beberapa kegiatan mengalami hambatan

1.3 Saran

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021 , perlu dilakukan langkah - langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

Meningkatkan Komitmen untuk semua penanggungjawab kegiatan dalam hal pengumpulan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dengan tepat waktu sesuai time lain yang telah di tentukan dan memberikan apresiasi kepada penanggungjawab yang melaporkan kegiatannya secara tepat waktu .

